

Pengembangan *E-Panduan* Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPS di SMP Kota Semarang

Noviani Achmad Putri[✉], Asep Ginanjar, Moh. Solehatul Mustofa, Radini Sinta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Juli 2025

Direvisi: September 2025

Diterima: November 2025

Keywords:

E-Guide, Anti-Corruption Education, Local Wisdom

Abstrak

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sekarang ini belum begitu optimal hal ini dikarenakan salah satunya belum adanya panduan bagi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi khususnya dalam pembelajaran IPS. Oleh karena itu butuh adanya upaya pengembangan panduan berupa *e-panduan* yang berisi tentang potensi kearifan lokal budaya Jawa sebagai sumber nilai Anti Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan yang mencakup 10 langkah umum, namun dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga tahapan saja. Hasil penelitian ini yakni 1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan melalui tiga pendekatan diantaranya: pendekatan materi, model pembelajaran, media pembelajaran; 2) Nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa dapat menjadi sumber nilai pendidikan anti korupsi melalui beberapa strategi. Penguatan Pendidikan Anti Korupsi ini dapat dilakukan melalui tiga strategi yakni: Literasi baca, literasi digital serta literasi budaya dan kewarganegaraan; 3) Berdasarkan hasil uji ahli materi, uji ahli media, serta uji pengguna *E-Panduan* sangat layak untuk dijadikan salah satu alternatif dalam menumbuhkan sikap anti korupsi pada peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Abstrac

The implementation of Anti-Corruption Education has not yet been fully optimized, partly due to the absence of a guideline for teachers to integrate anti-corruption values, particularly in Social Studies learning. Therefore, it is necessary to develop a guide in the form of an e-guide that contains the potential of Javanese cultural local wisdom as a source of anti-corruption values. The research method used in this study is research and development (R&D), which generally includes ten stages; however, this study focuses only on three of those stages. The results of the study are as follows: 1. The implementation of Anti-Corruption Education in Social Studies learning can be carried out through three approaches: content-based approach, learning model approach, and learning media approach; 2. The values of Javanese cultural local wisdom can serve as a source of anti-corruption education values through several strategies. The strengthening of Anti-Corruption Education can be achieved through three main strategies: reading literacy, digital literacy, and cultural and civic literacy; 3. Based on the results of expert validation in content, media, and user testing, the E-Guide is deemed highly feasible to be used as an alternative to foster anti-corruption attitudes among students at the junior high school level.

PENDAHULUAN

Sejak berdirinya negara Indonesia, bangsa Indonesia telah sepakat untuk bersama-sama membentuk sebuah negara dengan tujuan yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945, salah satu tujuannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sektor Pendidikan merupakan sektor yang mempunyai porsi tanggung jawab yang paling besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan bangsa yang cerdas yang dapat memajukan peradaban bangsa. Melalui Pendidikan sebuah bangsa akan dapat merancang masa depan dari bangsanya. Bangsa Indonesia selalu berusaha mewujudkan bangsa yang maju, beradab dan bermartabat. Melalui Pendidikan nasional bangsa Indonesia berusaha mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Nomor 20 Tahun 2023).

Mata Pelajaran IPS sebagai mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar dan menengah mempunyai peranan sentral dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan IPS bertujuan untuk membentuk peserta didik yang mempunyai pemahaman tentang bangsa, semangat kebangsaan, patriotisme, dan aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau *space* wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendikbud, Nomor 68 Tahun 2013). Tujuan IPS tidak hanya membentuk generasi yang mampu berpikir logis dan rasional, akan tetapi juga generasi yang mempunyai karakter dan nilai-nilai kebangsaan serta menjadi warga negara yang baik. Generasi muda sebagai warga negara yang baik diharapkan mampu menjadi tonggak perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita yang sedari dulu ditetapkan di dalam konstitusi negara Indonesia.

Salah satu penyebab negara Indonesia masih belum dapat mencapai cita-cita bangsa yaitu masih banyaknya praktik korupsi yang dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Korupsi merupakan masalah kompleks yang menghambat kemajuan Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa. Banyak institusi pemerintah di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Hal ini menciptakan celah bagi praktik korupsi. Proses birokrasi yang panjang dan rumit sering kali memicu praktik suap dan gratifikasi, karena individu merasa terpaksa untuk mempercepat proses dengan cara yang tidak etis. Selain itu dalam beberapa kasus, korupsi dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang diterima. Praktik seperti suap dan gratifikasi sering kali dianggap sebagai cara yang sah untuk mencapai tujuan. Pada tahun 2022 penindakan kasus korupsi mencapai angka 579 kasus dengan 1.396 orang dijadikan tersangka. Jumlah ini meningkat sebesar 8,63% dari tahun 2021 (Uozdz, 2025).

Berdasarkan laporan dari Transparency International (TI), skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100. Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei (Katadata.com, 2023). Hal ini dapat diartikan bahwa Negara Indonesia masih mengalami permasalahan serius terkait praktik korupsi. KPK sebagai lembaga yang didirikan khusus untuk memberantas praktik korupsi seringkali menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah. Salah satu program dari KPK yaitu *Anti-Corruption Teacher Supercamp*. *Teacher Supercamp* merupakan suatu program untuk meningkatkan daya dukung terhadap implementasi Pendidikan antikorupsi di sekolah dengan cara melakukan pemberdayaan kreativitas guru selaku tenaga pendidik dalam menciptakan dan mengembangkan berbagai model implementasi antikorupsi di sekolah.

Upaya dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia tentunya menjadi tugas

banyak pihak, tidak terbatas KPK sebagai lembaga yang didirikan khusus untuk memberantas korupsi. Lembaga Pendidikan termasuk didalamnya sekolah juga mempunyai peranan sentral dalam upaya mencegah terjadinya praktik korupsi. Akan tetapi, dunia pendidikan pun tidak terlepas dari permasalahan tindakan korupsi, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa dalam rentang tahun 2006-2021 terdapat 665 kasus tindakan korupsi yang terjadi di bidang pendidikan, bahkan korupsi di bidang pendidikan masuk kedalam 5 besar korupsi di Indonesia (www.antaraneews.com, 2025). Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong pengimplementasian Pendidikan Anti Korupsi di dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

KPK telah menerbitkan beberapa panduan dan panduan Pendidikan anti korupsi dari jenjang Pendidikan dasar sampai dengan Pendidikan tinggi, tetapi masih bersifat umum belum spesifik untuk mata Pelajaran tertentu serta Sebagian besar ditujukan untuk peserta didik. Sedangkan masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan Pendidikan anti korupsi ke dalam mata Pelajaran yang diampu, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arni Fajar dan Cairul Munirman yang menemukan kenyataan bahwa para guru pada awalnya masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi ke dalam rencana pembelajaran serta nilai-nilai di sekolah menengah pertama (Muriman, 2017). KPK tentunya mempunyai keterbatasan dalam melaksanakan pelatihan atau fasilitasi bagi guru. Maka diperlukan panduan Pendidikan anti korupsi per mata pelajaran sehingga dengan panduan ini guru dapat mengimplementasikan Pendidikan anti korupsi sesuai dengan mata Pelajaran yang diampu.

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di bidang pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik sesuai tingkatan sekolah serta perkembangan IPTEK yang sudah sangat massif dan mendisrupsi berbagai sendi kehidupan. Peserta didik pada

level Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan *digital native generation* yang generasi ini lahir, tumbuh dan berkembang berbarengan dengan perkembangan teknologi digital. Sehingga penanaman nilai-nilai dan pembentukan karakter anti korupsi tentunya harus menyesuaikan dengan karakteristik generasi tersebut. E-Panduan disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan guru serta karakteristik peserta didik sebagai *digital native generation*.

Panduan pendidikan anti korupsi akan lebih fleksibel serta mudah diakses dimana dan kapan saja jika dalam bentuk digital atau dapat disebut dengan E-Panduan. Guru IPS akan dengan mudah mempelajari bagaimana pengintegrasian Pendidikan anti korupsi pada mata Pelajaran IPS disela-sela kesibukannya dalam menjalankan tupoksinya. Dengan *E-Panduan* Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal, guru IPS setiap saat dapat mendesain pembelajaran IPS yang bermuatan Pendidikan anti korupsi berbasis digital yang relevan dengan kehidupan peserta didik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan Pengembangan *E-Panduan* sebagai petunjuk bagi guru IPS dalam mengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi kedalam pembelajaran IPS. Penelitian pengembangan *E-Panduan* ini juga selaras dengan tema penelitian pengabdian yang dicanangkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu SDG 4 mengenai Pendidikan Berkualitas dengan menggunakan peran teknologi dalam proses pembelajaran dan nilai-nilai lingkungan dalam hal ini kearifan lokal untuk membentuk karakter anti korupsi pada peserta didik, penelitian ini juga selaras dengan tema SDG 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan institusi kuat dengan fokus mengenai korupsi dan pembangunan. Pengembangan *E-Panduan* akan dilaksanakan dan diujicobakan secara terbatas di SMP Kota Semarang, oleh sebab itu, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengembangan *E-Panduan* Pendidikan Anti Korupsi berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran IPS di SMP Kota Semarang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (*research and development*). Menurut Borg dan Gall (1983) maksud penggunaan istilah produk pendidikan (*educational products*) dijelaskan lebih jauh, tidak hanya wujud material seperti buku teks, film pembelajaran, tetapi juga berhubungan dengan pengembangan proses dan prosedur, seperti pengembangan media pembelajaran (Borg, 1983).

Pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya *Research and Development* adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi dimasyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk yang dikembangkan (Sugiyono, 2017). Metode penelitian dan pengembangan juga didefinisikan sebagai pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan bisa berbentuk software ataupun *hardware* seperti buku, panduan, paket, program pembelajaran ataupun alat bantu (Haryati, 2012).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah berawal dari adanya keberadaan SPAK Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap dunia Pendidikan. SPAK Indonesia adalah sebuah organisasi mandiri yang bergerak dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi untuk mendorong perubahan yang dimulai dari diri sendiri sampai pada perubahan sistem. Lahir sebagai sebuah gerakan dengan Saya Perempuan Antikorupsi di tahun 2014, SPAK kemudian menjadi organisasi mandiri di tahun 2019 dan sampai saat ini telah memiliki jaringan agen di 34 provinsi dengan sejumlah lebih dari 2800 perempuan dari berbagai latar belakang profesi.

Dalam dunia pendidikan, SPAK Indonesia membangun gerakan Guru Pembangun Peradaban yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kurikulum Antikorupsi melalui penguatan guru sebagai contoh nyata (*role model*) dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembangunan gerakan ini memberikan pelajaran penting bagi SPAK Indonesia tentang pentingnya membangun kesadaran guru sebagai pendidik dan perpanjangan tangan orang tua tentang pentingnya nilai-nilai antikorupsi agar dapat menjadi contoh nyata membangun karakter siswa yang berintegritas. Guru memegang peran penting dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter kuat.

Komunitas yang menamakan diri SPAK atau “Saya Perempuan Antikorupsi” Indonesia, mencanangkan program yang disebut “Sekolah Jujur, Sekolah Saya”. SPAK Indonesia menawarkan program “*Sekolah Jujur, Sekolah Saya*” dalam membentuk ekosistem antikorupsi di sekolah. Dalam program ini, tiap sekolah diminta untuk mewujudkan suatu inisiatif kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi, di antaranya transparansi anggaran sekolah, kantin jujur, kotak temuan barang hilang, kode etik sekolah dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi dan sebagainya. Sekolah diberikan kebebasan untuk memiliki inisiatif kegiatan yang mereka anggap paling mungkin sesuai dengan kondisi sekolah. Dalam proses pelaksanaan inisiatif tersebut, sekolah didampingi oleh para Agen SPAK secara rutin.

SPAK Indonesia memilih 10 sekolah diberbagai provinsi yang ada Indonesia salah satunya Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang. Beberapa sekolah SMP yang ada di Kota Semarang dipilih menjadi sekolah pilot project untuk Sekolah Jujur Sekolah saya dinilai karena memiliki siswa yang dianggap mampu menjadi agen perubahan dan memiliki kemampuan untuk melakukan advokasi serta dapat membangun kolaborasi dengan para Kepala Sekolah dan guru di sekolah sasaran. Beberapa sekolah tersebut diantaranya SMP Negeri 3 Semarang, SMP 37 Semarang dan SMP Islam Terpadu PABP Semarang. Penetapan sekolah tersebut

berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 421/360 Tahun 2023 tentang Penetapan *Pilot Project* Sekolah Jujur Sekolah Saya di Kota Semarang Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan berkaitan dengan implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah masih dilaksanakan dalam bentuk berbagai program sekolah seperti yang sudah disebutkan di atas. PAK yang ada di sekolah belum menjadi kurikulum khusus yang berdiri sendiri melainkan masih terintegrasi ke dalam beberapa mata Pelajaran yang relevan. Proses ini disebut dengan insersi atau pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi kedalam beberapa mapel atau materi Pelajaran. Mata Pelajaran yang biasanya relevan dengan PAK yakni Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Berkaitan dengan implementasi PAK dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan melalui berbagai strategi diantaranya melalui pendekatan materi yang relevan, metode pembelajaran bervariasi, dan media pembelajaran yang inovatif.

Namun ternyata, berdasarkan kondisi di lapangan masih banyak guru-guru yang belum terampil atau terlatih dalam menanamkan nilai-nilai Anti Korupsi khususnya yang berbasis kearifan lokal di sekolah. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pelatihan dan sarana edukasi untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah *E-Panduan* Pendidikan Anti Korupsi yang berbasis Kearifan Lokal. *E-Panduan* ini disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan guru serta karakteristik peserta didik sebagai *digital native generation*. Peserta didik pada level Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan *digital native generation* yang generasi ini lahir, tumbuh dan berkembang berbarengan dengan perkembangan teknologi digital. Selain itu pengembangan *e-panduan* ini bertujuan untuk membantu guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam proses pembelajaran IPS di sekolah. Hal ini mencakup peningkatan pemahaman guru tentang korupsi, dampaknya, dan cara pencegahannya, serta memberikan strategi dan

metode untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik. *E-Panduan* Pendidikan Anti Korupsi ini nantinya berisi tentang beberapa materi yang berkaitan dengan: Konsep dasar korupsi; Nilai-nilai anti korupsi; Potensi kearifan lokal budaya Jawa; Integrasi dalam kurikulum; Metode Pembelajaran dan Contoh Aktivitas.

E-Panduan pendidikan anti korupsi ini dikembangkan agar lebih fleksibel serta mudah diakses dimana dan kapan saja jika dalam bentuk digital. Guru IPS akan dengan mudah mempelajari bagaimana pengintegrasian Pendidikan anti korupsi pada mata Pelajaran IPS disela-sela kesibukannya dalam menjalankan tupoksinya. Dengan *E-Panduan* Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal, guru IPS setiap saat dapat mendesain pembelajaran IPS yang bermuatan Pendidikan anti korupsi berbasis digital yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Penelitian pengembangan *E-Panduan* ini juga selaras dengan tema penelitian pengabdian yang dicanangkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu SDG 4 mengenai Pendidikan Berkualitas dengan menggunakan peran teknologi dalam proses pembelajaran dan nilai-nilai lingkungan dalam hal ini kearifan lokal untuk membentuk karakter anti korupsi pada peserta didik, penelitian ini juga selaras dengan tema SDG 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan institusi kuat dengan fokus mengenai korupsi dan pembangunan. Pengembangan *E-Panduan* akan dilaksanakan dan diujicobakan secara terbatas di SMP Kota Semarang.

Pengembangan E-Panduan Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPS

Tahapan pengembangan e-panduan Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal memakai 10 langkah pengembangan dari Borg dan Gall. Dalam penelitian ini, 10 langkah tersebut disederhanakan menjadi tiga Langkah yaitu tahap studi pendahuluan, tahap desain produk, serta tahap uji terbatas. Hasil dari tiga tahapan pengembangan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a. Tahap Studi Pendahuluan

Pada tahap studi pendahuluan ini merupakan tahap analisis kebutuhan yang didasarkan pada studi literatur dan hasil wawancara baik pada saat observasi maupun pada saat penelitian. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan diperoleh studi pendahuluan yang berkaitan dengan urgensi daripada Pendidikan Anti Korupsi bagi para generasi milenial. Berdasarkan studi pendahuluan muncul beberapa masalah yang menjadi dasar akan kebutuhan Pendidikan Anti Korupsi yang sekarang ini harus digalakkan. Masalah-masalah tersebut yang muncul di lapangan saat ini meliputi:

1. Belum terciptanya ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda sehingga perlu strategi penguatan karakter anti korupsi yang efektif dan efisien. Pendidikan antikorupsi merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara masif dan terus menerus, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan kemajuan teknologi yang ada.
2. Kurangnya kesadaran akan bahaya laten korupsi di kalangan para pelajar sehingga butuh penguatan Pendidikan Anti Korupsi agar pelajar sebagai generasi penerus bangsa mempunyai tanggung jawab serta mampu berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.
3. Semakin meningkatnya kasus Korupsi di Indonesia hingga masuk ke urutan lima besar negara terkorup sehingga hal ini mendesak diperlukannya Pendidikan Anti Korupsi pada semua jenjang Pendidikan dan semua pihak baik keluarga, sekolah serta masyarakat.
4. Minimnya nilai integritas di kalangan para pelajar sehingga perlu strategi dalam menyemai nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi agar dapat mengingatkan diri untuk tidak berperilaku koruptif.
5. Masih banyak pelajar yang belum paham betul tentang jenis-jenis tindakan korupsi baik yang terlihat maupun tidak sehingga mereka belum mampu mengklasifikasikan dalam level konkret. Sehingga mereka belum

memahami betul tindakan mana yang berakibat baik dan berakibat buruk.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di atas maka diperlukan sekali Pendidikan Anti Korupsi bagi para peserta didik. Namun disisi lain pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi yang selama ini telah dilaksanakan masih jarang didasarkan pada Nilai-nilai budaya lokal yang ada dilingkungan tempat tinggal. Padahal nilai-nilai budaya lokal ini yang penuh dengan syarat nilai dan ajaran bagi para pelajar. Salah satu bagian dari nilai-nilai budaya lokal yang relevan dengan Pendidikan Anti Korupsi yakni nilai-nilai kearifan lokal pada budaya Jawa. Namun hasil penelitian di lapangan berkaitan dengan implementasi Pendidikan Anti Korupsi belum berbasis nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa. Sehingga berdasarkan kondisi ini dibutuhkan sekali implementasi Pendidikan Anti Korupsi berdasarkan kearifan lokal. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan PAK berbasis nilai-nilai kearifan lokal demham mengembangkan sebuah media berupa E-Panduan PAK. E-Panduan ini biasanya seperti diketahui berbentuk cetak. Namun dalam pengembangan panduan kali ini, kami peneliti mencoba untuk mengembangkan dalam bentuk digital atau E-Panduan. Tujuan daripada E-Panduan ini agar dapat diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapan pun.

b. Tahap Desain Produk

Tahap desain produk e-Panduan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis dalam mengembangkan media pembelajaran digital yang aplikatif, interaktif, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Pada tahap ini, dirancang e-Panduan penerapan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam pembelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang tidak hanya berfungsi sebagai acuan bagi guru IPS, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh guru mata pelajaran lain serta kepala sekolah dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas dan antikorupsi di lingkungan sekolah.

Proses desain dimulai dengan penyusunan kerangka isi e-Panduan, yang terbagi menjadi empat bagian utama meliputi: Bagian 1,

“Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi”; Bagian 2, “Perilaku-Perilaku Anti Korupsi,” menguraikan berbagai nilai pembentuk perilaku antikorupsi dan indikatornya; Bagian 3, “Amalkan Perilaku Anti Korupsi,” memuat panduan teknis penerapan nilai antikorupsi dalam kegiatan belajar mengajar; Bagian 4, “Ajarkan Perilaku Anti Korupsi,” menguraikan strategi memperluas implementasi nilai-nilai antikorupsi melalui intervensi pembudayaan di masyarakat dan upaya meluaskan pendidikan berbudaya antikorupsi di luar kelas.

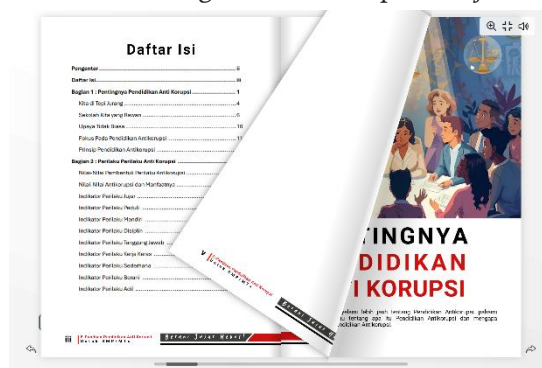
Semua materi tersebut dikembangkan dengan menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif peserta didik SMP dan mengaitkan dengan kearifan lokal wilayah Semarang dan sekitarnya, seperti *Adigang Adigung Adiguna* (Mandiri), *Adol Lenga Kari Busike* (Peduli), *Aja Cidra Ing Janji* (Tanggungjawab), *Aja Cidra Mundahk Cilaka* (Jujur), *Aja Ketungkul Marang Kalungguhan*, *Kadonyan lan Kemareman* (Sederhana), *Aja Melik Darbeking Liyan* (Disiplin), *Aja Milik Barang Kang Melok Darbeking Liyan* (Sederhana), *Akal Koja* (Adil), *Aluwung Kalah Wang Tinimbang Kalah Wong* (Berani), *Ambegal Sambi Ngayang* (Mawas Diri), *Ana Dina Ana Upa* (Kerja Keras), *Anutupi Babahan Hawa Sanga* (Mawas Diri).



Gambar 1. Tampilan E-Panduan pada saat format PDF

Selanjutnya, disusun *draft* dan *layout* e-panduan dengan mempertimbangkan aspek desain visual, interaktivitas, serta keterbacaan, sehingga mudah dipahami dan menarik bagi pengguna. E-Panduan dilengkapi dengan contoh

RPP/Modul Ajar, lembar kegiatan peserta didik (LKPD), infografis, serta tautan interaktif untuk memperkaya pengalaman belajar. Produk akhir disajikan dalam format PDF interaktif, yang kemudian dikonversi melalui *platform* Heyzine menjadi *flipbook* digital agar tampil lebih dinamis, mudah diakses melalui berbagai perangkat, dan menarik untuk digunakan dalam pembelajaran.



Gambar 2. Tampilan E-Panduan setelah dikonversi menjadi *flipbook*

Dengan demikian, e-Panduan ini bukan hanya menjadi sarana pembelajaran inovatif bagi guru IPS, tetapi juga menjadi alat strategis bagi seluruh warga sekolah dalam membangun budaya antikorupsi yang berbasis pada kearifan lokal, mendukung visi sekolah berintegritas, dan menyiapkan generasi muda yang jujur, tangguh, serta berkarakter mulia.

c. Tahap Uji Terbatas

Tahapan pengembangan dilakukan pengujian validasi oleh ahli materi dan ahli media, sehingga didapat masukan terkait kesesuaian materi dengan tujuan Pendidikan anti korupsi dan masukan terkait *layout* panduan. Ahli materi berasal dari Dosen Pendidikan Kewarganegaraan yang paham mengenai Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Ahli media berasal dari Profesi Dosen dari Jurusan Teknologi Pendidikan. Setelah mendapat masukan dari ahli materi serta ahli media kemudian dilakukan perbaikan, setelah itu e-Panduan diuji Kembali kepada guru Mata Pelajaran IPS di Kota Semarang. Validasi ahli dan uji kelayakan menggunakan skala Likert dengan kriteria intepretasi skor berdasarkan interval yang dapat dilihat pada table 4.1. berikut.

Tabel 1. Interpretasi Skor Kelayakan

Interval	Kategori
0-19,99	Sangat Tidak Layak
20-39,99	Tidak Layak
40-59,99	Cukup
60-79,99	Layak
80-100	Sangat Layak

Uji Materi

Uji ahli materi terhadap E-Panduan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) berbasis Kearifan Lokal dilakukan oleh seorang dosen ahli bidang Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan nilai-nilai karakter dan kebangsaan. Tujuan utama uji ini adalah untuk memastikan kelayakan isi, keakuratan konsep, serta relevansi materi e-Panduan dalam mendukung pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Komponen penilaian meliputi: kualitas ilustrasi, potensi e-Panduan sebagai suplemen materi pembelajaran, representasi nilai-nilai kearifan lokal, kemampuan meningkatkan pemahaman peserta didik, kemenarikan tampilan, kemudahan dipahami, dan kemudahan digunakan oleh guru maupun siswa. Hasil dari uji ahli materi dapat dilihat pada diagram 1. berikut.

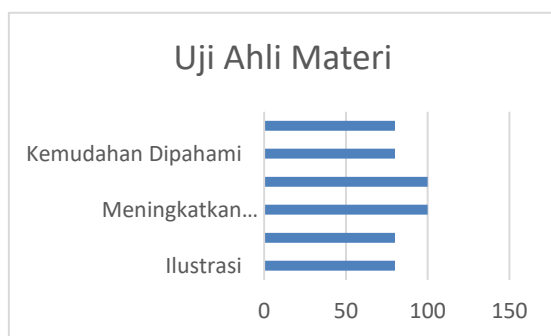


Diagram 1. Hasil Uji Ahli Materi

Hasil uji ahli materi sebagaimana disajikan pada Diagram 1 menunjukkan bahwa e-Panduan memperoleh rentang skor antara 80 hingga 100. Indikator ilustrasi, nilai-nilai

kearifan lokal, kemudahan dipahami, dan kemudahan penggunaan memperoleh skor 80 (sangat layak), sedangkan indikator peningkatan pemahaman peserta didik serta kemenarikan memperoleh skor 100 (sangat layak). Secara keseluruhan, rata-rata skor sebesar 86,66 menempatkan e-Panduan Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal pada kategori sangat layak berdasarkan kriteria interpretasi skor pada Tabel 1.

Media pembelajaran yang baik harus memenuhi kriteria kejelasan pesan, kemudahan penggunaan, serta kemampuan memotivasi dan meningkatkan pemahaman peserta didik (Arsyad, 2018). Dalam konteks e-Panduan ini, kemudahan akses dan tampilan interaktif menjadi faktor penting yang memperkuat fungsi media digital sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Materi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik akan lebih bermakna dan mudah dipahami, sehingga integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam e-panduan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya serap dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi (Hamalik, 2014).

Pendidikan berbasis kearifan lokal berperan penting dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa, karena nilai-nilai lokal dapat menjadi dasar dalam membangun etika sosial dan moral antikorupsi (Tilaar, 2012). Oleh karena itu, keberhasilan e-panduan ini dalam memenuhi aspek kelayakan materi menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dengan pendidikan antikorupsi merupakan pendekatan yang relevan, efektif, dan sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan pada penguatan karakter dan pembelajaran kontekstual.

Dengan demikian, secara teoretis dan empiris, hasil uji ahli materi menunjukkan bahwa e-Panduan Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal telah memenuhi aspek kelayakan isi, relevansi, dan kebermanfaatan, sehingga dapat digunakan sebagai panduan implementatif Pendidikan Anti Korupsi dalam pembelajaran IPS di SMP untuk mendukung

pembentukan karakter integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial peserta didik.

Uji Ahli Media

E-Panduan Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal telah melalui proses uji kelayakan oleh ahli media dengan tujuan untuk menilai sejauh mana e-Panduan ini memenuhi standar kualitas sebagai panduan penerapan Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Proses uji ahli ini mencakup sejumlah indikator penting yang menilai aspek visual, teknis, dan fungsional, seperti kemenarikan tampilan, kemudahan dipahami dan digunakan, kualitas serta proporsi gambar atau ilustrasi, kemenarikan dan keterbacaan elemen visual dan teks, keselarasan warna font dengan latar belakang, ukuran dan penempatan font, kejelasan penyampaian pesan, tata letak teks dan gambar, resolusi gambar, serta tingkat kemudahan penggunaan secara keseluruhan. Hasil dari uji ahli media dapat dilihat pada diagram 2. berikut.

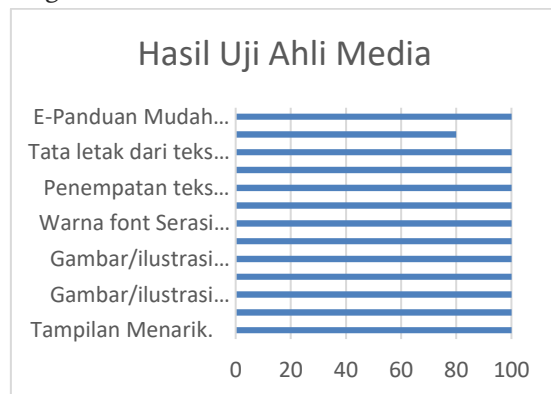


Diagram 2. Hasil Uji Ahli Media

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Diagram 2, hampir seluruh indikator memperoleh skor sempurna (100), sementara indikator resolusi gambar mendapat skor 80. Dengan demikian, rata-rata skor yang diperoleh menunjukkan bahwa e-Panduan ini tergolong dalam kategori sangat layak untuk digunakan. Hal ini menandakan bahwa E-Panduan Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal telah memenuhi kriteria panduan sekaligus

media pembelajaran yang menarik, mudah digunakan, dan efektif dalam menyampaikan pesan edukatif.

Tampilan *layout* yang dirancang secara proporsional dengan kombinasi warna, *font*, dan ilustrasi yang harmonis membuat e-Panduan ini tidak hanya estetik tetapi juga komunikatif. Gambar dan teks yang digunakan mudah dibaca, informatif, serta mendukung pemahaman pengguna terhadap nilai-nilai anti korupsi yang dikontekstualisasikan dengan kearifan lokal. Hal ini menjadikan e-Panduan mampu berfungsi ganda sebagai sumber informasi sekaligus sebagai alat pembentuk karakter antikorupsi siswa melalui konteks budaya mereka sendiri.

Selain itu, keunggulan utama e-Panduan ini adalah sifatnya yang fleksibel dan mudah diakses. Karena berbasis *cloud storage*, e-Panduan dapat digunakan kapan pun dan di mana pun selama tersedia koneksi internet. Fitur ini memberikan kemudahan bagi guru maupun siswa untuk memanfaatkan panduan secara praktis, baik di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Dengan segala kelebihanannya, e-Panduan Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal sangat layak dijadikan sebagai panduan implementatif dalam pembelajaran IPS, sekaligus sebagai media inovatif dalam upaya penanaman nilai-nilai integritas dan anti korupsi sejak dini.

Uji Pengguna

Setelah melalui tahap uji kelayakan oleh ahli materi dan ahli media, E-Panduan Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal kemudian direvisi sesuai dengan masukan untuk menyempurnakan aspek isi, tampilan, serta kemudahan penggunaan. Tahap berikutnya adalah uji coba pengguna (*user test*) untuk mengetahui efektivitas dan penerimaan e-Panduan oleh pengguna sesungguhnya. Dalam penelitian ini, pengguna dipilih dari unsur guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang berjumlah 10 orang. Guru dipilih sebagai pengguna karena mereka berperan langsung dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi di kelas dan memahami konteks pembelajaran IPS yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya

masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sapriya yang menyatakan bahwa pembelajaran IPS berfungsi menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang di masyarakat, termasuk kejujuran dan tanggung jawab sebagai bagian dari karakter antikorupsi (Sapriya, 2017).

Uji pengguna dilakukan dengan menilai delapan indikator, yaitu kemudahan digunakan, fungsi sebagai panduan pembelajaran, kemudahan dipelajari, kemampuan menambah wawasan, representasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi (PAK), peningkatan pemahaman, tampilan menarik, dan kemudahan dipahami. Hasil dari uji pengguna dapat dilihat pada diagram 3. berikut.

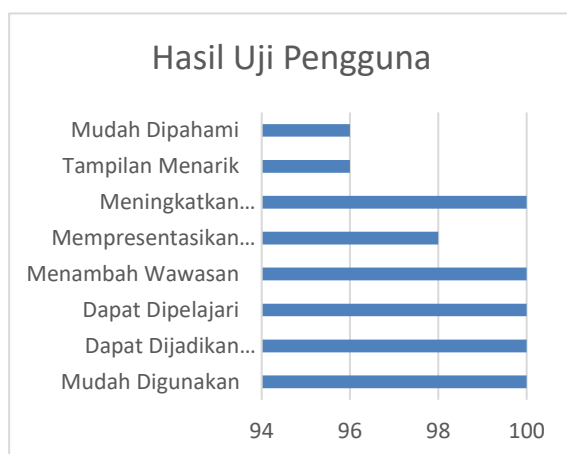


Diagram 3. Hasil Uji Pengguna

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada Diagram 3, diperoleh rata-rata skor sebesar 98,75 dengan kategori “sangat layak”. Hasil ini menunjukkan bahwa e-Panduan telah memenuhi kriteria kelayakan baik dari aspek isi maupun tampilan. Dua indikator yang memperoleh skor 96 adalah kemudahan dipahami dan tampilan menarik, menunjukkan bahwa e-Panduan dirancang dengan memperhatikan prinsip desain edukatif dan keterbacaan tinggi (Arsyad, 2019). Sementara itu, indikator representasi nilai-nilai PAK memperoleh skor tertinggi, yaitu 98, yang menegaskan bahwa konten e-panduan secara efektif menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, kerja keras,

kepedulian sosial, tanggung jawab, dan disiplin nilai-nilai yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Temuan ini selaras dengan pandangan Tilaar bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai sumber nilai dan moral dalam pendidikan karakter, karena nilai-nilai yang tumbuh dari budaya masyarakat bersifat kontekstual, mudah diterima, dan memiliki makna bagi peserta didik (Tilaar, 2012). Dalam konteks pembelajaran IPS, pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi berbasis kearifan lokal melalui e-panduan ini membantu guru menanamkan karakter positif dengan pendekatan yang dekat dengan realitas sosial siswa. Dengan demikian, e-Panduan Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal dinyatakan sangat layak digunakan sebagai panduan pembelajaran di SMP. e-Panduan ini tidak hanya mempermudah guru dalam mengelola pembelajaran berbasis nilai, tetapi juga memperkuat peran IPS sebagai wahana pembentukan karakter antikorupsi yang relevan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan di atas, amaka kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya: Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan melalui tiga pendekatan diantaranya: *Pertama*, pendekatan materi. Materi dalam pembelajaran IPS dipilah berdasarkan Capaian Pembelajaran dan sasaran materi yang ada di kelas 7, 8 dan 9. *Kedua*, pendekatan model pembelajaran. Metode pembelajaran tentunya disesuaikan dengan kurikulum Merdeka sekarang ini yang sedang berjalan. Model pembelajaran yang dapat diintegrasikan PAK seperti Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*); Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*); dan Model Pembelajaran Berbasis Inkuiri (*Inquiry Based Learning*). *Ketiga*, pendekatan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran begitu sangat penting guna mempermudah proses penguatan dan penanaman nilai-nilai Pendidikan Karakter Anti Korupsi kepada

peserta didik. Salah satu pemilihan media yang dipilih dalam penelitian ini untuk penguatan nilai-nilai anti korupsi salah satunya dengan membuat media pembelajaran berupa E-Panduan. Berdasarkan hasil uji ahli materi, uji ahli media, serta uji pengguna E-Panduan PAK berbasis Kearifan Lokal sangat layak untuk dijadikan salah satu alternatif dalam menumbuhkan sikap anti korupsi pada peserta didik di tingkat SMP. E-Panduan ini dapat dijadikan suplemen, media maupun sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan desain pembelajaran yang telah dirancang oleh guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, A. (2018). Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arsyad, A. (2019). Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers.
- Borg, W.R., & Gall, M.D. (1983). Educational research: An introduction (4th ed). New York & London: Longman.
- Hamalik, O. (2014). Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryati, S. 2012. Research dan Development (R&D) sebagai Salah Satu Model Penelitian dalam Bidang Pendidikan. Majalah Ilmiah Dinamika. 37 (1) : 11-16.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/skor-indeks-persepsi-korupsi>. (Diakses pada tanggal 27 Februari 2025).
- <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ>. (Diakses pada tanggal 26 Februari 2025).
- <https://www.antaranews.com/berita/3297567/cw-ungkap-lima-alasan-pendidikan-antikorupsi-penting-berantas-korupsi>. (Diakses pada 24 Februari 2025).
- Muriman, C., Supandi, & F, A. (2017). Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Kurikulum 2013 Kelas X. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Permendikbud No 68 Tahun 2013.
- Sapriya. (2017). Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS): Konsep dan Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tilaar, H. A. R. (2011). Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural di Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). Kebudayaan dan Pendidikan Nasional: Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Era Globalisasi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.